

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori *Agency*

*Agency theory* yang dikemukakan oleh Meckling, Akuntabilitas pada mulanya ditandai dengan kemunculan diferensiasi antara manajemen dan pemilik (Harianto, 2021). Manajemen dilabeli “*agent*” sedangkan pemilik dicap “*principal*”. Keterkaitan dianggap bertalian dengan korelasi keagenenan (*agency intercourse*) menurut banyak pakar *responsibilitas* unjuk kerja lembaga pemerintahan ialah suatu pemahaman di mana dilandaskan kepada perspektif keagenenan. Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi perantara (agen) memiliki wewenang dalam menyediakan data transparan serta akurat kepada khalayak sebagai *principal* sehingga dengan demikian mereka dapat paham dan melakukan evaluasi jenjang berhasil atau tidak berhasil dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah yang diemban. *Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak *principal* (Lesmono & Siregar, 2021).

Dalam *Agency theory* dikenal adanya kontrak kerja, yang akan mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh *principal* dan agen. Selain itu, kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara *principal* dan agen yang secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh *principal* kepada agen.

Implikasi Teori Agensi terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung, akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diperkuat dengan merancang sistem insentif yang tepat, menyusun kontrak kinerja yang baik, dan meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau pemegang kepentingan.

Dalam konteks penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *Agency theory* dalam akuntabilitas kinerja OPD Kota Bandar Lampung dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan bahwa OPD Kota Bandar Lampung bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat (Mudrikah & Ali, 2020).

## **2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, pimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan negara (Pratama et al., 2029).

Akuntabilitas publik merupakan fondasi utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, aparat pemerintah perlu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan pelaksanaan pekerjaannya kepada masyarakat. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik merujuk pada penyediaan informasi mengenai aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Humaeroh et al., 2022). Fokus utama dari akuntabilitas publik adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Anggraini et al., 2020). Selain itu, akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan merespons pertanyaan terkait apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang direncanakan oleh organisasi sektor publik.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan lebih sulit untuk diwujudkan dibandingkan dengan upaya memberantas korupsi. Pencapaian akuntabilitas publik menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk fokus lebih pada

pertanggungjawaban horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya terbatas pada pertanggungjawaban vertical, yang hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap otoritas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk menyusun laporan keuangan eksternal yang dapat mencerminkan kinerja lembaga sektor publik (Kisworo & Shauki, 2019).

Menurut Menurut Sujarweni, akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Agustiana, 2020). Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Menurut Humaeroh (2022), konsep akuntabilitas secara luas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja serta tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan. Menurut Rudi M. Harahap mengemukakan definisi Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah sebagai tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja terkait pelaksanaan keberhasilan/kegagalan misi organisasi, badan hukum, atau pimpinan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban (Diah Precelina & Wuryani, 2015).

Menurut Nurkholis, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu konsep etika yang terkait dengan administrasi publik di dalam pemerintahan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Sofyanoor, 2022). Konsep ini menekankan sifat pertanggungjawab, kemampuan memberikan jawaban, ketidakberdayaan untuk bebas bertindak, dan adanya kewajiban pada individu atau penguasa yang

dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik yang terkait dengannya. Selain itu, individu tersebut juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menurut Husain (2023) mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai suatu kewajiban bagi seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat tercermin melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Sedangkan Puspa (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah tanggung jawab pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan merujuk pada definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang melibatkan individu atau penguasa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks instansi pemerintah, konsep ini menuntut pemahaman lingkup akuntabilitas oleh setiap lembaga, bagian, atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokoknya. Akuntabilitas mencakup evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas menjadi suatu prinsip etika yang fundamental dalam administrasi publik, mendorong para pemegang amanah untuk secara jelas dan transparan menjalankan tugas dan kewajiban mereka kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang baik, saat ini tengah diperjuangkan di Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk menyampaikan laporan mengenai hasil program yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah

pemerintah telah beroperasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk menerapkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang optimal, diperlukan suatu sistem yang efisien dan terkoordinasi dengan baik, serta adanya peraturan sebagai panduan bagi instansi pemerintah (Jacobus et al., 2023).

AKIP telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang secara sistematis untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, klarifikasi, ringkasan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab dan upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah, baik bagian maupun lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas pokoknya, harus memahami lingkup akuntabilitasnya sendiri. Pasalnya, akuntabilitas yang diminta mencakup kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. AKIP menjadi manifestasi dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat terwujud tanpa pemerintah memberikan informasi kepada rakyat mengenai pengumpulan sumber daya dan penggunaannya serta melibatkan masyarakat (Ningsih et al., 2020).

AKIP merupakan alat pertanggungjawaban yang pada dasarnya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara komprehensif dan terintegrasi. Fungsinya adalah untuk memenuhi tanggung jawab suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta misi organisasi. Instruksi

Presiden No 7 tahun 1999 menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang mencakup tahapan seperti penetapan perencanaan strategi, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas publik yang diterapkan oleh organisasi sektor publik memiliki beberapa dimensi (Novatiani et al., 2019), meliputi:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan jabatan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Terkait dengan evaluasi apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah memadai, mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan penilaian apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat secara luas.

Menurut LAN dan BPKP (Nurhidayat, 2023) dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar *akuntabel*.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Novatiani (2019) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut:

1. Penetapan rencana strategik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

### **2.3 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2021) Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada entitas dan organisasi yang berhubungan dengan domain publik, seperti pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas publik, serta dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

Menurut Sari (2016) Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas berhubungan dengan domain

publik. Akuntansi sektor publik memiliki berbagai jenis dan ruang lingkup, seperti manajemen keuangan publik, perencanaan makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai sebuah proses untuk mengelompokkan, mencatat, mengkategorikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dana untuk sebuah lembaga publik yang mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pemungutan sebuah ketentuan, yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian. Dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang.

Terdapat beberapa indikator dalam akuntansi sektor publik menurut (Musa Yosep, 2020) meliputi:

1. Tingkat Transparansi Keuangan
2. Kualitas Laporan Keuangan
3. Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi
4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan
5. Kinerja dan Efisiensi Program
6. Ketepatan Pengeluaran Anggaran
7. Ketepatan dan Kualitas Pengungkapan Informasi
8. Penerapan Prinsip Good Governance



Setiap indikator ini membantu dalam menilai dan mengevaluasi kinerja entitas publik serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dijalankan (Musa Yosep, 2020).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik.

Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah dalam objektivitas laporan kinerja yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan, yaitu antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Pihak manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk rnenghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang, sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

### 3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain sejenisnya. Dengan demikian daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.

### 4. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

### 5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

## 6. Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (*subjective judgment*), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan *professional judgment* yang didasarkan pada teknik tertentu.

Dalam buku "Akuntansi Sektor Publik" Ayuningtyas (2010) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktupencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
5. Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang

dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### **2.4 Kualitas Laporan Keuangan**

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis sektor publik maupun sektor sosial. Menurut Bastian (2013) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi (2013) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Menurut Mahmudi (2011) Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain Pengelolaan keuangan Negara, Pelaporan Keuangan, Pemeriksaan, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normatif. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Kartini, 2016) antara lain:

1. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salah satu unsur prasyarat normatife pelaporan keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik

*(feedback value)* yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
3. Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi-Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri.
4. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan, secara langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap laporan keuangan dilakukan melalui observasi, perhitungan, dan pengukuran.

6. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
7. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas. sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi dan pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (Pemerintah Indonesia, 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No 17 Tahun 2010) dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi kesimpulan yang relevan dapat dikaitkan dengan maksud pengguna. Informasi laporan keuangan yang relevan sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pemahaman yang menyesatkan atau kesalahan material dan semua fakta dari adalah benar dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi dapat menyesatkan pengguna jika sifat dan penyajiannya tidak dapat diandalkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- c. Netralitas
- d. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya informasi yang termuat dalam laporan keuangannya akan lebih berguna. Membandingkannya dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Bila entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahun itu yang dimaksud dengan perbandingan secara internal. Dan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama, itu dimaksud perbandingan secara eksternal. Apabila suatu lembaga mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih unggul dari kebijakan akuntansi saat ini, perubahan tersebut diungkapkan dalam periode dimana perubahan tersebut terjadi.

## 3. Dapat dipahami

Pengguna dapat memahami apa yang disajikan didalam laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas paham para pemakai. Karena itu, pengguna diperkirakan mempunyai pengetahuan yang memadai dari kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelapor, lalu adanya keinginan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.5 Variabel Y

Variabel Y adalah simbol dari variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2019) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y).

## 2.6 Variabel X

Variabel X adalah simbol dari variabel bebas atau yang sering disebut dengan variabel independen. Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan (X2).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang dilakukan benar-benar orisinil. Berikut ini penelitian terdahulu yang dimaksud :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti             | Judul Penelitian  | Metode Penelitian      | Hasil Penelitian   |
|-----|----------------------|---|------------------------|--|
| 1.  | Oktavia Aulia (2021) | Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk pengawasan |



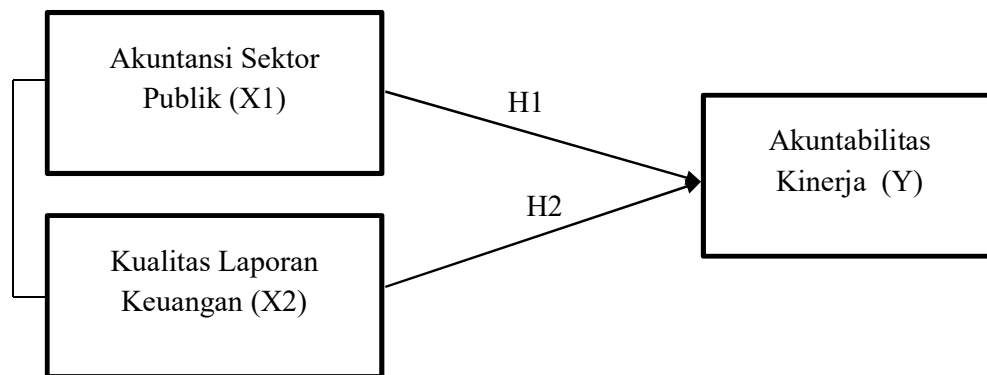
|    |                              |   |   |  |
|----|------------------------------|---|---|--|
|    |                              | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekan Baru   |   | kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan.  |
| 2. | Suwardana (2021)             | Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten sidoarjo) | Kuantitatif   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sementara kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. |
| 3. | Rosalia Eka Hikmawati (2022) | Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan                        | Pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif | Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Berbeda dengan variabel akuntansi sektor publik yang berpengaruh tetapi tidak signifikan                                |

|    |  |   |             |   |
|----|--|---|-------------|---|
|    |  | Aset Daerah<br>Kabupaten Jember)  |             | terhadap akuntabilitas<br>kinerja instansi<br>pemerintah.   |
| 4. | Muhammad<br>Syahputra<br>Rizki,<br>Novien<br>Rialdy<br>(2023)  | Pengaruh<br>Penerapan<br>Akuntansi<br>Pemerintahan dan<br>Pengawasan<br>Kualitas Laporan<br>Keuangan<br>Terhadap<br>Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah<br>Provinsi Sumatera<br>Utara Pada Badan<br>Keuangan Aset<br>Daerah | Kuantitatif | Hasil penelitian<br>menunjukkan bahwa<br>penerapan akuntansi<br>pemerintahan dan<br>pengawasan kualitas<br>laporan keuangan<br>memiliki pengaruh<br>signifikan terhadap<br>akuntabilitas kinerja<br>instansi pemerintah di<br>Kantor Badan<br>Keuangan dan Aset<br>Daerah Provinsi<br>Sumatera Utara. |
| 5. | Christian<br>Timotius<br>Peilouw,<br>Dwi<br>Dayanti<br>Oktavia,<br>Agusta<br>Amanda<br>Wulandari,<br>Chyntia<br>Febriliany<br>Latuan | Pengaruh<br>Penerapan<br>Akuntansi Sektor<br>Publik Dan<br>Kualitas Laporan<br>Keuangan<br>Terhadap<br>Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah Pada<br>Badan Pengelolaan<br>Keuangan dan Aset                                   | Kuantitatif | Hasil dari studi ini<br>menunjukkan bahwa<br>penerapan akuntansi<br>sektor publik<br>memengaruhi kinerja<br>akuntabilitas lembaga<br>pemerintah, dan<br>kualitas laporan<br>keuangan<br>memengaruhi kinerja<br>akuntabilitas lembaga<br>pemerintah. Sementara   |

|  |        |                                       |  |   |
|--|--------|---------------------------------------|--|---|
|  | (2023) | Daerah (BPKAD)<br>Kabupaten<br>Kupang |  | itu, penerapan bersama akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah. |
|--|--------|---------------------------------------|--|---|

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah sintesa atau model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori itu berhubungan satu dengan lainnya berdasarkan teori-teori yang dikumpulkan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## **2.9 Bangunan Hipotesis**

Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang akan diuji kebenarannya melalui proses penelitian atau pengujian. Hipotesis seringkali dihasilkan dari pengamatan atau observasi atas suatu fenomena atau masalah yang ingin dikaji secara lebih lanjut, (Arikunto 2019).

### **2.9.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung**

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Akuntabilitas Sektor Publik adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berbagai penelitian tentang pengaruh akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah telah dilakukan salah satunya adalah Peilouw et.al (2023) yang menyatakan bahwa bahwa secara parsial, penerapan akuntansi sektor publik memengaruhi kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah. Menurut Oktavia Aulia (2021) akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial dan simultan.

**H1 : Terdapat Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung.**

**2.9.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung**

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Dewi, 2020). Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan juga bisa dipertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) pengawasan kualitas laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Hikmawati (2022) kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan atau positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H2 : Terdapat Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Bandar Lampung.**